**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL TERHADAP KORBAN BENCANA KEBAKARAN**

**DI KOTA SAMARINDA TAHUN 2018**

Muhammad Lukmanul Hakim

151110013509142

Jurusan Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Jl. Ir. H Juanda, No 80, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75123

**ABSTRAK**

**MUHAMMAD LUKMANUL HAKIM,** Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Terhadap Korban Bencana Kebakaran di Kota Samarinda Tahun 2018 Bapak Suhardiman, S.Sos, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Diana, S.Sos M.Si selaku pembimbing II.

Pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan, observasi dan wawancara secara langsung dengan Narasumber, Narasumber adalah Kepala Dinas, Sekertaris Kepala Dinas dan Kepala Bidang Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana yang ditentukan dengan teknik analisa data. Data yang telah di dapat kemudian di analisa dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Terhadap Korban Bencana Kebakaran di Kota Samarinda, maka pada bab ini dapat diambil secara garis besar sebagai berikut : Dalam penyaluran bantuan sosial Peram Dinas Sosial bermaksud membantu kelangsungan hidup dasar kepada korban bencana, hidup dasar maksudnya bantuan untuk bertahan hidup berupa makanan, pakaian dan lain sebagainya.

**Kata Kunci : Peran Dinas Sosial, Penyaluran Bantuan Sosial**

1. **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai penduduk yang sangat banyak, maka diperlukan peningkatan pembangunan untuk menopang kesehjateraan penduduknnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional adalah usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Selain itu, tujuan Pembangunan Nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual, serta menjalankan roda perekonomian yang mewujudkan kesehjateraan sosial. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang pemerintahan daerah, dimana sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan, kesehjateraan dan kemakmuran rakyat melalui peranan dan keberpihakan negara dalam meningkatkan taraf hidup rakyat.

Pertumbuhan penduduk yang meningkat secara alamiah dan arus migrasi yang tidak terkendali khusunya wilayah perkotaan yang sering kali menyebabkan peningkatan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan munculnya permasalahan perkotaan. Salah satunya permasalahan perkotaan yaitu membludaknya pemukiman penduduk tanpa disertai adanya jaminan keamanan dan keselamatan. Permasalahan perkotaan yang sering terjadi diperkotaan pada lingkungan padat penduduk salah satunya yaitu kebakaran pemukiman pusat pertokoan.

Kebakaran merupakan suatu kejadian yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan korban jiwa dimasyarakat. Kebakaran adalah suatu fenomena yeng terjadi ketika suatu bahan mencapai temperatur kritis dan dan bereaksi secara kimia dengan oksigen yang menghasilkan panas, nyala api, cahaya asap, uap air, karbon monoksida, karbon dioksida, ataupun produk dan efek lainnya (Furness dan Muckett, 2007). Pada abad ke-21,

Kebakaran merupakan salah satu tantangan pada aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) karena dampak dari kejadiannya yang sangat merugikan (Beyler, 2001)

Peran dinas sosial sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam penanganan bencana bidang bantuan sosial sangat dirasakan tidak hanya pada saat bencana tetapi pada setiap tahapan siklus bencana juga pasca bencana.

Kesiapsiagaan dinas sosial dalam mengahadapi bencana diwujudkan dalam bentuk kesiapsiagaan di daerah berupa sandang, pangan dan lain sebagainya. Seluruh program penanganan bencana yang dilaksanakan oleh dinas sosial diarahkan sesuai dengan konsep.

Dinas sosial kota samarinda merupakan instansi teknis di kota samarinda yang menyelenggarakan urusan wajib sosial, sebagai upaya mendukung tercapainya Visi kota samarinda seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sejalan dengan rencana pencapaian misi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dinas sosial memiliki peran cukup strategis dalam penanganan masalah kesehjateraan sosial, itu penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di kota samarinda terutama yang menjadi kewenangan dinas sosial adalah peningkatan keburfungsian sosial para Penyandang Masalah Kesehjatraan Sosial (PMKS).

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk lebih mengefektifkan kegiatan pendataan korban bencana dilapangan, agar diperoleh data yang akurat untuk digunakan dalam mengambil langkah-langkah pemberian bantuan sosial tanggap darurat dan mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana.

Hasil pelaksanaan kegiatan penanganan masalah-masalah strategi yang menyangkut bencana kota samarinda tahun 2018. Adapun rekap kejadian bencana

Kota Samarinda Tahun 2018 berikut ini :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Uraian Kejadian | Jumlah |
| Kasus | KK | Jiwa | Rumah | Bangsalan |
| 1 | Kebakaran | 43 | 350 | 1.229 | 230 | 25//99 Pintu |
| 2 | Pohon Tumbang |  |  |  |  |  |
| 3 | Tanah Longsor | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | Banjir | 1 | 8.254 | 24.699 |  |  |
| 5 | Kapal Tenggelam |  |  |  |  |  |
|  | Jumlah | 45 | 8.805 | 25.924 | 231 | 25/99 Pintu |

1. **RUMUSAN MASALAH**

Untuk memperjelas agar permasalahan yang ada nantinya dapat dibahas lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan maka penting bagi penulis dalam menyusun suatu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimanakah peran dinas sosial dalam penyaluran bantuan terhadap korban bencana kebakaran di kota samarinda?

1. **METODE PENELITIAN**
	1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskritif dengan pendekatan kualitatif, di mana rumusan masalah akan di jawab berdasarkan data yang di peroleh di lapangan baik dari data primer maupun data sekunder dalam Penyaluran Bantuan Sosial Terhadap Korban Bencana Kebakaran di Kota Samarinda Pada Tahun 2018.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif selain dapat mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang ril juga di harapkan juga dapat mengungkapkan nilai-nilai tersembunyi. Sedangkan pendekatan penilaian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor seperti di kutip oleh Moleong ( 2004:3 ) adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan pendekatan Kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati.

Pada metode penelitian deskriptif dengan pendekatan Kualitatif ini tidak hanya terbatas pada pengumpulan data dan penyusunan data, tetapi juga meliputi penelitian dan interprestasi data yang telah di kumpul dan segala sesuatu dalam penelitian ini, yang di tentukan dari hasil pengumpulan data yang mencermikan keadaan yang sesungguhnya di lapangan

* 1. **Subyek Penelitian**

Dalam penelitian ini adapun yang menjadi sumber data penelitian antara lain hasil observasi yang dilakukan dilokasi penelitian, informan dan berbagai dokumen atau arsip-arsip yang menyangkut dengan hasil kinerja pegawai.

Yang menjadi informan penelitian adalah:

1. Informan kunci :

- Dr. H.M. Ridwan Tasa, MM sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Samarinda

- Dra. Hj. Ida Nursanti, M,Si sebagai Sekretaris Dinas Sosial Kota Samarinda

- Rusmansyah, SE sebagai Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana

2. Informan biasa:

* Masyarakat yang menjadi korban bencana kebakaran di Kota Samarinda

Jumlah informan dalam penelitian kualitatif tidak ditentukan, dalam hal ini peneliti melakukan penggalian data melalui wawancara mendalam dari satu informan keinforman lainya dan seterusnya sampai peneliti tidak lagi menemukan masalah baru. Dengan kata lain, bila mana peroses pengumpulan data sudah tidak ada lagi ditemukan variasi informasi dianggap sudah selesai.

Sesuai dengan pendapat Moleong (2004 : 136) bahwa berapa jumlah informan dalam penelitian kualitatif belum diketahui sebelum peneliti melakukan pengumpulan data dilapangan. Yang demikian karna pengumpulan data suatu penelitian kualitatif mempunyai tujuan tercapainya kualitas data yang diperlukan.

* 1. **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik yang di pergunakan penulis dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah:

1. Observasi

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Dalam hal ini penulis mengamati kegiatan para pegawai yang terkait pada proses kinerja para pegawai di kantor Dinas Sosial Kota Samarinda

 2. Wawancara.

Wawancara adalah suatu kegiatan yang di lakukan untuk mendapat informasi secara langsung dari para responden. Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat di konstulikasi makna dalam suatu topik tertentu. Menurut Esterberg dalam Sugiyono ( 2016:72 )

Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang peran dinas sosial yang terjadi di kantor dinas sosial. di mana hal tersebut tidak di temukan melalui observasi.

* 1. **Teknik Analisa Data**

Analisis data peneliti dimulai sejak awal penelitian atau turun ke lapangan dan setiap data yang diemukan dilapangan akan ditulis dalam bentuk laporan lapangan. Pembuatan laporan lapangan dimaksudkan sebagai bahan dalam langkah analisis data terakhir yaitu pada saat akan menulis laporan hasil penelitian. Bahwa setiap laporan yang masuk akan disusun sedemikian rupa sehingga memudahkann bagi penulis untuk mengetahui data apa saja yang masih kurang atau masih diperlukan dalam penulisan nantinya.

Analisis data mengacu pada model Miles and Huberman dalam Sugiyono (2016 : 91) yang menyebutkan langkah-langkah analisis data yakini sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisa data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan semakin lama peneliti dilapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Mereduksi data berati merangkum memilih hal-hal yang pokok, mempokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan

1. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara skatagori, flowchart dan sejenisan. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang akan terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penlitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola yang baku yang tidak lagi berubah. Pola tersebut selanjudnya didisplaykan pada laporan akhir penelitian.

1. Penarikan Kesimpulan

Langkah ke tiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan data verifikasi. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang vaild dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kradibel.

 Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian mungkin menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karna seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada dilapangan.

Komponen dalam analisis data kualitatif



Prosedur penelitian merupakan penjelasan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam suatu penelitian. Menurut Moleong (2004:127-148), langkah-langkah prosedur penelitian meliputi tiga hal yaitu :

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap ini merupakan tahap awal yang dilakukan peneliti dengan pertimbangan etika penelitian lapangan melalui tahap pembuatan rancangan usulan penelitian hingga menyiapkan perlengkapan penelitian. Dalam tahap ini peneliti diharapkan mampu memahami latar belakang penelitian dengan persiapan-persiapan diri yang mantap untuk masuk dalam lapangan penelitian.

1. Tahap Analisa Data

Pada tahap ini dilakukan kegiatan yang berupa mengolah data diperoleh dari narasumber maupun dokumen, kemudian akan disusun kedalam sebuah penelitian. Hasil analisa tersebut dituangkan dalam bentuk laporan sementara sebelum menulis keputusan akhir

1. **Hasil dan Pembahasan**
	1. **Gambaran Lokasi Penelitian**

Dinas sosial adalah sebuah lembaga pemerintahan yang menanggulangi dan mengatasi permasalahan sosial yang timbul dimasyarakat yang ada di Kalimantan Timur khususnya di Kota Samarinda. Dinas sosial ini beralamat di Jalan Dahlia No. 12 RT 04, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur 75121, Indonesia.

Dinas Sosial ini pertama kali berdiri pada tanggal 3 April 1976 dengan nama Kantor Department Sosial Kotamadya Samarinda yang diresmikan oleh Kepala Kanwil. Departmen Sosial, Privinsi Kalimantan Timur, oleh Drs Koernandi Masdar, kemudian pada tahun 2001 namanya berganti menjadi Kantor Sosial dan Pemakaman Kota Samarinda. Pada tahun 2008 namanya kembali berganti lagi menjadi Dinas Kesehjateraan Sosial Kota Samarinda sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintahan mengharuskan adanya perubahan organisasi yang dikenal dengan sebutan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Atas dasar perubahan status tersebut Walikota Samarinda membentuk SKPD termasuk didalam terbentuknya Dinas Kesehjateraan Sosial Kota Samarinda dengan peratuan Walikota Samarinda, bahwa Dinas Kesehjateraan Sosial dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda, bagian keempat dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor : 23 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi.

Seiring dengan berjalannya waktu maka ditahun 2016 nama Dinas Kesehjateraan Sosial Kota Samarinda, berubah lagi menjadi Dinas Sosial Kota Samarinda, hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat diselenggarakan dengan berasaskan :

1. Intensitas Urusan Pemerintahan dan Peraturan Daerah
2. Efesiensi
3. Efektivitas
4. Pembagian habis tugas
5. Rentang kendali
6. Tata kerja yang jelas, dan
7. Fleksibel

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bahwa dalam pembagian Dinas Sosial ditipekan menjadi Tipe A dengan menetapkan 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang dan untuk melaksanakan hal tersebut diatas perlu lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organsasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit dbawahnya maka ditetapkan Dinas Sosial Kota Samarinda dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Samarinda.

Adapun dalam kepemimpinannya baik itu dari Kantor Department Sosial Kotamadya Samarinda hingga sampai dengan berganti namanya menjadi Dinas Sosial, beberapa pejabat yang memimpin Organisasi Perangkat Daerah Tersebut adalah sebagai berikut :

1. Heri Bertha Sri Suciati (1995-2001)
2. Laksmi Edmoneri Bertha Sri Suciati (2001-2007)
3. Iindra Hadi (2008-2010)
4. H. Sulaiman Sade, M.Si (2010-2012)
5. H. Makmun Andi Nuhung, M.Si ( 2012-2013)
6. Hermanto, M. Hum (2013-2015)
7. H. Suryawan Atmadja (2015-2016)
8. H. Tejo Sutarnoto, SH, M.Si ( 2016- Plt. Kadis)
9. Marnabas, S.Sos. M,Si (2016 kurang lebih 3 bulan)
10. H. M. Ridwan Tasa, MM (2017 s/d Sekarang)
	1. **Hasil dan Pembahasan**

**4.2.1 Peran Dinas Sosial dalam Penyaluran Bantuan Sosial**

Penyaluran bantuan terhadap korban bencana kebakaran dianggap lemah merupakan hal yang harus selalu diperhatikan terutama pihak terkait. Jika yang diarahkan pada banyak pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Dinas Sosial Kota Samarinda mempunyai peran penting dalam melaksanakan program kerja.

Dari hasil wawancara penelitian yang dilakukan dengan Bapak Dr. H. M. Ridwan Tasa, MM selaku Kepala Dinas beliau mengatakan bahwa Peran Dinas Sosial sesuai dengan tugas dan fungsi membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang sosial, yaitu dengan memberikan bantuan kepada korban kebakaran. Beliau juga mengatakan bahwasanya menekankan perlunya bantuan untuk korban bencana. Penyaluran bantuan ini bermaksud membantu kelangsungan hidup dasar kepada korban bencana, hidup dasar maksudnya bantuan untuk bertahan hidup berupa makanan, pakaian, dan lain sebagainya.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Rusmansyah, SE beliau mengatakan adapun peran Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan sosial adalah memberi bantuan kebutuhan pokok, berupa, sarden, mie instan, kecap, minyak goreng, tempat tinggal sementara berupa tenda-tenda dan sementara masyarakat di ungsikan di tenda-tenda yang dibangun oleh dinas sosial setempat.

**4.2.2 Program Dinas Sosial dalam Penanganan Kebakaran**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Dra. Hj. Ida Nursanti, M,Si beliau mengatakan adapun program yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam penanganan kebakaran Sebenarnya penanganan bencana kebakaran adalah wewenang dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda Dinas Sosial Kota Samarinda dalam hal ini menangani pada korban bencana. Program yang telah dilakukakan oleh Dinas Sosial dalam hal penanganan pada korban bencana kebakaran adalah memberikan bantuan sosial kebutuhan hidup dasar :

* + - 1. Permakanan yaitu berupa : beras, sarden, mie instan, minyak goreng, kecap manis, kecap asin, pakaian, seragam sekolah, kebutuhan ibu ibu hamil dan menyusui, kit ware dan family kit.
			2. Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) untuk jumlah rumah korban diatas 30 rumah Dinas Sosial mengusulkan bantuan ke Kementrian Sosial RI, melalui rokemendasi Dinas Sosial Provinsi Kaltim.
			3. Korban yang meninggal dunia akibat kebakaran Dinas Sosial mengusulkan ke Kementrian Sosial RI, melalui rokemendasi Dinas Sosial Provinsi Kaltim untuk mendapatkan bantuan santunan kematian.
			4. Pelayanan Dapur Umum Lapangan Menyesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan dari Camat dan Lurah (sebagai penanggung jawab).
			5. Memberikan penyuluhan kepada keluarga mengenai mitigasi, pencegahan mengurangi resiko bencana.

**4.2.3 Hambatan Dinas Sosial dalam Penanganan Kebakaran**

Dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala atau hambatan yang dihadapi dalam penanganan kebakaran ini adalah keterbatasan dana untuk mendirikan rumah singgah. Di samping itu, sumber daya manusia dari Dinas Sosial sendiri hanya sedikit dan sangat kurang untuk diturunkan dalam penanganan bencana kebakaran. Maka dari itu mereka belum bias menjalankan implementasi tersebut secara efektif dan efisien secara maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rusmansyah, ada beberapa hambatan dan kendala dalam penanganan kebakaran, yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya anggaran untuk memberikan bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) kepada korban kebakaran, yang jumlahnya dibawah 10 rumah.
2. Tidak adanya mobil yang standby untuk Mobilisasi angkutan Barang bantuan bagi korban bencana.
3. Perlu penambahan anggaran untuk melengkapi bantuan kebutuhan hidup dasar bagi korban bencana.

Hasil penelitian langsung dengan Korban Kebakaran pernah terjadi di Samarinda tepatnyaa di Jalan Pahlawan Gang Tempurung, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu.

‘’Berdasarkan wawancara dengan Bapak Roby Korban Kebakaran beliau mengatakan asal mula terjadi kebakaran akibat adanya kebocoran gas, yamg kemudian gas yang tersebar langsung tersambar api dari kompor pemilik rumah yang terbakar. ‘’Melihat api yang sudah menyebar kami langsung berusaha memadamkan dengan peralatan seadanya sambil menunggu pemadam datang

Di saat petugas pemadam bersama unsur relawan masih bahu membahu memadamkan api, salah seorang warga terjatuh dari atap rumahnya akibat membantu pemadam untuk memadamkan api. Bahkan adapula salah seorang warga yang pingsan karena menghirup kepulan asap. Dari kejadian ini ada dua korbana luka, salah seorang warga terjatuh dari atap rumahnya, saat ini sedang kami bantu obati, dan salah seorang warga lagi tadi sudah kami bawah ke RS terdekat.

Bangunan yang terbakaran terdiri dari 4 rumah tunggal dan 3 bangsal kayu 7 pintu yang dihuni 35 jiwa dari 8 KK.

‘’Dari data yang telah Bapak Roby himpun, yang habis terbakar itu ada 7 bangunan, terdiri dari 4 rumah tunggal dan 3 bangsal kayu 7 pintu’’. Dalam kejadian itu, tidak ada korban jiwa. Namun memang ada beberapa warga yang mengalami luka-luka.

Dalam penanganan pemadama api, unsur tim Pemadaman Kebakaran dibantu oleh Relawan gabungan Kota samarinda. Diterjunkan 8 Unit tanki Damkar dan PMK swasta serta 10 mesin portable relawan guna memadamkan api.

* 1. **Pembahasan**

Setelah analisa dilakukan maka selanjutnya adalah melakukan pembahasan hasil penelitian.

Penyaluran bantuan terhadap korban bencana kebakaran dianggap lemah merupakan hal yang harus selalu diperhatikan terutama pihak terkait. Jika yang diarahkan pada banyak pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Dinas Sosial Kota Samarinda mempunyai peran penting dalam melaksanakan program kerja.

Program yang telah dilakukakan oleh Dinas Sosial dalam hal penanganan pada korban bencana kebakaran adalah memberikan bantuan sosial kebutuhan hidup dasar

Permakanan yaitu berupa : beras, sarden, mie instan, minyak goreng, kecap manis, kecap asin, pakaian, seragam sekolah, kebutuhan ibu ibu hamil dan menyusui, kit ware dan family kit.

Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) untuk jumlah rumah korban diatas 30 rumah Dinas Sosial mengusulkan bantuan ke Kementrian Sosial RI, melalui rokemendasi Dinas Sosial Provinsi Kaltim.

Korban yang meninggal dunia akibat kebakaran Dinas Sosial mengusulkan ke Kementrian Sosial RI, melalui rokemendasi Dinas Sosial Provinsi Kaltim untuk mendapatkan bantuan santunan kematian.

Pelayanan Dapur Umum Lapangan Menyesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan dari Camat dan Lurah (sebagai penanggung jawab).

Memberikan penyuluhan kepada keluarga mengenai mitigasi, pencegahan mengurangi resiko bencana.

 kendala-kendala atau hambatan yang dihadapi dalam penanganan kebakaran ini adalah keterbatasan dana untuk mendirikan rumah singgah. Di samping itu, sumber daya manusia dari Dinas Sosial sendiri hanya sedikit dan sangat kurang untuk diturunkan dalam penanganan bencana kebakaran. Maka dari itu mereka belum bias menjalankan implementasi tersebut secara efektif dan efisien secara maksimal.

 Ada beberapa hambatan dan kendala dalam penanganan kebakaran, Kurangnya anggaran untuk memberikan bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) kepada korban kebakaran, yang jumlahnya dibawah 10 rumah. Tidak adanya mobil yang standby untuk Mobilisasi angkutan Barang bantuan bagi korban bencana. Perlu penambahan anggaran untuk melengkapi bantuan kebutuhan hidup dasar bagi korban bencana.

1. **Penutup**
	1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara yang dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Samarinda tentang Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Terhadap Korban Bencana Kebakaran Di Kota Samarinda Tahun 2018 dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa Dinas Sosial Kota Samarinda sesuai dengan tugas dan fungsi membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang sosial, yaitu dengan memberikan bantuan kepada korban bencana, oleh karena itu dalam penyelenggaraan bantuan bagi korban kebakaran diperlukan langkah penanganan baik pada masa pra, saat dan pasca bencana yang diimplementasikan sebagai berikut :

1. Masa pra bencana, menyiapkan bahan pemenuhan kebutuhan darurat korban ketika terjadi bencana dengan penyediaan bufferstock (bahan permakanan, sandang dan peralaatan dapur).
2. Masa bencana, bantuan bagi korban kebakaran sangat diperlukan karena korban dalam kondisi panik, kehilangan harta benda temasuk rumah yang musnah atau rusak

Melihat permasalahan yang telah ditangani oleh Dinas Sosial Kota Samarinda dalam penanganan kebakaran, sejauh ini hasil yang dicapai sudah berjalan dengan baik, namun belum sepemuhnya terealisasi dengan sempurna.

* 1. Saran
		+ 1. Sebaiknya perlu adanya monitoring, serta perhatian dari pemerintah khusunya Gubernur, Walikota, Dinas Sosial Kota Samarinda terhadap Tugas fungsi dan peran Dinas Sosial agar penanggulangan bencana kebakaran dapat lebih baik lagi sebaiknya lakukan Koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah karena untuk menangani masalah penanggulangan bencana dibutuhkan kerjasama dan koordinasi dari berbagi pihak
			2. Untuk memudahkan dalam dalam melakukan evakuasi terhadap korban bencana kebakaran, Dinas Sosial Kota Samarinda diharapkan menambah jumlah sumber daya manusia dibidang penanggulangan bencana alam sehingga dalam proses penanggulangan bencana dan tanggap darurat bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, efektif dan efisien.

**DAFTAR PUSTAKA**

Beyler, C. L. 2001*. Fire Safety Challenges in the 21st century,Journal of Fire*

*Protection Engineering,* 11, 4- 15.

Badan Standar Nasional Indonesia SNI 03-3989-2000 *Pengertian Kebakaran, Jakarta: SNI;2010*

Data Kejadian Bencana Kebakaran https:// kaltim-tribunnews-com.cdn.ammproject.org

Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Samarinda <https://dinsossamarindakota.wordpress.com>

diakses pada tanggal 10 agustus 2016 pukul 16.00

Kamus Besar Bahasa Indonesia 2015. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Kementrian Sosial Republik Indonesia. (2011 : 15) Tentang Pengertian Bantuan Sosial.

Kanfer, R. 1987. *Task-specific motivation: An Integrative Approach To Issus Of Measurement, Mechanisms, Processes, And Determinants. Journal Of Social And Clinical Psychology*. England: London Press

Moleong , Luxy J, 2004, *Metodologi Penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya, Bandung*.

Muckett, M dan Furness, A. 2007 , *introduction to Fire Safety Management,*

oxford, Elsevier Ltd.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/ Lembaga.

Peraturan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 04/MEN/1980

Tentang Jenis-jenis Kebakaran.

Poerwadarminta. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: BalaiPustaka

Ramli, 2010, *Pengertian Kebakaran Jakarta: Dian Rakyat*

Soekanto, Soerjono, 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar,* Jakarta: CV. Rajawali

Soekanto, Soerjono. 2002. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press

Sugiyono 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.*

Undang Undang *Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.*

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional

[http://www.danasosialssm.co.vu/2013/05/pengertian-bantuan-sosial-dan-tata-cara.html](http://www.danasosialssm.co.vu/2013/05/pengertian-bantuan-sosial-dan-tata-cara.html%20)

<https://kbbi.web.id/peran>. Diakses pada 11 2019 15:15 November

[www.Badan](http://www.Badan) Kesehjateraan Sosial Nasional. Diakses pada 2019 22:08 November

[www.pemkomedan.go.id/hal-medan-tembung.html](http://www.pemkomedan.go.id/hal-medan-tembung.html), diakses pada 24 2019 17.00 November